

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal dan hidup di daerah pedesaan. Keanekaragaman kemiskinan dan keterbatasan tersebut menurunkan kualitas dan melemahkan semangat dan kemampuan masyarakat desa (Bryant 2005). Dengan keadaan masyarakat desa yang demikian itu maka sangat wajarlah apabila pembangunan desa dan masyarakat desa beroleh perhatian yang besar dan prioritas yang tinggi dalam kerangka pembangunan nasional bangsa Indonesia sejak awal-awal pembangunan dicanangkan pada masa pemerintahan orde lama, masa orde baru, hingga masa reformasi sekarang ini.

Sebagaimana diketahui bahwa konsepsi pembangunan desa yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia selama ini ialah menjadikan masyarakat desa sebagai obyek (Sasaran) dan sekaligus sebagai subyek (Alat) dari proses pembangunan desa itu sendiri. Dalam konsep pembangunan desa yang demikian itu maka pemerintah hanya berperan sebagai pemberi arahan (mengarahkan), bimbingan, dan bantuan fasilitas yang diperlukan; sedangkan masyarakat adalah merupakan pemeran utamanya. Dengan kata lain, inisiatif, prakarsa dan partisipasi masyarakat merupakan faktor utama pembangunan desa, sedangkan pemerintah hanyalah berperan memberikan arahan, bimbingan dan bantuan fasilitas yang diperlukan.

proses pembangunan yang telah terjadi merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal itu perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat. dalam proses pembangunan terdapat dua paradigma yaitu, paradigma top down dan bottom up. David Korten mengatakan salah satu penentu keberhasilan dalam proses pembangunan yaitu jenis pendekatan yang dipilih antara top down ataupun *bottom up*. Model *top down* seringkali digunakan oleh negara-negara berkembang. Pendekatan bottom up dibangun atas berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia. Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan. (Supeno, 2005)

Berdasarkan kenyataan pembangunan desa selama ini, terlihat adanya dua kecenderungan utama dari individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat desa dalam hubungan dengan partisipasi dalam pembangunan desa, yaitu : pertama, partisipasi yang muncul karena prakarsa atau inisiatif sendiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat (sering disebut partisipasi sukarela), dan kedua, ialah partisipasi bukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri masyarakat yang bersangkutan, tetapi karena digerakkan atau

dimobilisasi oleh pemerintah (kadang-kadang mengandung unsur paksaan). Partisipasi bentuk kedua ini memang dibutuhkan terutama pada tahap-tahap awal pembangunan desa dimana kesadaran atau inisiatif masyarakat masih perlu dibimbing oleh pemerintah; akan tetapi manakala kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat maka pendekatan yang sifatnya *top down* ini perlu dikurangi, dan sebaliknya pembangunan desa sedapat mungkin dilaksanakan berdasarkan pendekatan yang sifatnya *bottom-up* (Taliziduhu, 2001).

Berdasarkan UU No. 72 Tahun 2005 tentang kepala desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembangunan di desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka diketahui bahwa berdasarkan pengamatan penulis. Kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan dan kemasyarakatan di desa Lorotulus belum maksimal karena kepala desa kurang mengambil peran dalam menjalankan roda pemerintahan dimana kepala desa harus mempunyai peran penting untuk melaksanakan urusan pemerintahan yakni melaksanakan tata kelola administrasi pelayanan di desa dan melayani masyarakat dalam mengurus seperti surat keterangan tidak mampu surat penghasilan orangtua yang belum maksimal oleh karena semua

urusan yang berkaitan dengan administrasi yang selalu di ambil alih oleh aparat desa dalam hal ini sekretaris desa, hal ini disebabkan karena masih ada faktor yang menghambat kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan yakni pendidikan yang di tempuh masih rendah sehingga kurang mampu dalam menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat juga belum merasakan tugas dan fungsi kepala desa yang baik dalam menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimana kepala desa sebagai pemegang pemerintahan perlu mengambil peran penuh dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat tepat pada sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa kepala desa telah melaksanakan pembangunan tetapi tindakan itu masih kurang dan tidak tepat pada sasaran. Hasil dari pembangunan itu adalah bak penampung air bersih yang diadakan dua unit saja dan juga bak penampung air bersih yang diadakan delapan unit yang mana difasilitasi kepada masyarakat yang tenaga terbatas karena kebutuhan air bersih untuk masyarakat hanya dialirkan pada siang hari sehingga belum menunjang kebutuhan masyarakat dan bak penampung air bersih yang sudah dilaksanakan tetapi tidak difungsikan oleh masyarakat karena sumber air untuk pengadaan pipa dalam pembagian pada setiap bak penampung belum ada. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa masyarakat sangat mendukung apa bila kepala desa melaksanakan pembangunan yang tepat pada sasaran karena masyarakat berkeinginan bila pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kebutuhan mereka. Maka untuk memperjelas data pelaksanaan pembangunan desa Lorotulus tahun 2019 dapat dilihat pada taebel berikut ini:

Tabel. 1.1
Pelaksanaan Pembangunan Desa Lorotulus Tahun 2019

No	Jenis pembangunan	Lokasi Pembangunan	Volume	Jumlah Danah	Jenis Dana	Keterangan
1	Bak Penampung Air Bersih	8 Dusun	8 Unit	Rp 80.000.000	ADD	Selesai
2	Renovasi Sumur bor	2 Dusun	2 Unit	Rp 60.000.000	ADD	Selesai
	Jumlah			Rp 140.000.000		

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Lorotulus tahun 2019 yaitu Bak penampung air bersih 8 unit dibagi dalam 8 dusun dengan jumlah dana 80.000.000 yang sudah selesai dilaksanakan dan Renovasi Sumur Bor 2 unit dibagi dalam 2 dusun dengan jumlah dana 60.000.000, total dana yang digunakan dalam program pembangunan di tahun 2019 yakni: Rp 140.000.000, diketahui bahwa menurut pengamatan penulis pembangunan yang dilaksanakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembangunan yang dilaksanakan masih kurang dan belum tepat pada sasaran.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, maupun

pemerintah desa serta masyarakat setempat. Dalam memainkan perannya dalam pembanguna desa, pemerintahan juga harus melihat setiap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan atau akan dilaksanakan, baik itu berupa peraturan, perundang-undangan, maupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankan. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pemecahan masalah ataukah dibalikny dapat menimbulkan masalah baru lagi dalam pembangunan tersebut. Masalah pertama dalam pengembangan partisipasi masyarakat oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan: Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefenisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh aparat pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah. Kedua, pada pelaksanaan pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kebutuhan masyarakat, yang dirancang dan ditetapkan masyarakat sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.

Gambaran di atas, tidak seperti yang dialami atau terjadi di Desa Lorotolus, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, permasalahannya di Desa Lorotolus, diketahui bahwa realisasi pembangunan fisiknya belum maksimal oleh karena tingkat partisipasi masyarakat rendah. Selain itu tingkat masyarakat tinggi bahkan sebagian pembangunan fisik yang telah dikerjakan

tidak dipelihara oleh masyarakat, karena masih ada tanggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah. Munculnya tanggapan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **Dampak Mobilisasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bak Penampung Air Bersih Di Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.**

1.2 Rumusan Masalah

“Berdasarkan masalah di atas maka penulis membuat perumusan Masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Dampak Mobilisasi Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Bak Penampung Air Bersih Di Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dampak Mobilisasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bak Penampung Air Bersih Di Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Dampak Mobilisasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bak Penampung Air Bersih Di Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau rujukan bagi penulis sendiri maupun para peneliti lain yang sejenis sehingga dapat berguna bagi ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman terutama ilmu pemerintahan. Dan diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah melalui pengembangan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak/peneliti lain.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan kerja dan fungsi pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam pembangunan bak penampung air bersih sehingga pembabangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menyasar langsung kepada masyarakat desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.